LAPORAN
PENELITIAN

Penelitian Produk Unggulan
(Studi Kasus Di Kelurahan Betet,
Kecamatan Pesantren, Kota Kediri)

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
OKTOBER 2015

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Sertifikat

Nomor: 10.10.1/UN32.14/LT/2016

Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang dengan ini menyampaikan penghargaan kepada:

Nama : Dr. Dwi Wulandari , S.E., M.M.
NIP : 198101052005012004
Jabatan : Dosen FE Universitas Negeri Malang
Sebagai : Ketua

dalam kegiatan penelitian (DIPA Fakultas) yang berjudul: **Penelitian Produk Unggulan (Studi Kasus di Kelurahan Betet, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri)** yang dilaksanakan pada tahun 2015 di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UM

Malang, 10 Oktober 2016
Ketua,

Prof. Dr. H. Ach. Fatchan, M.Pd., M.P
NIP. 19570715 198601 1002

RINGKASAN

Kota Kediri sebagai salah satu Kota di Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu kota yang memiliki potensi beragam dalam mengembangkan berbagai hasil alam yang diperoleh. Berbagai usaha dan produk telah diproduksi di kota ini sehingga kota ini memiliki produsi khas unggulan yang dapat menyokong perekonomian masyarakat kota kediri. Berbagai hasil yang diperoleh antara lain yaitu sambel pecel, keripik tempe, tahu stik, dan telur asin. Selain produk tersebut masih banyak bidang jasa lainnya yang menjadi penyokong perekonomian masyarakat,

Penelitian ini mengambil sampel salah satu daerah dimana masyarakat desa tersebut juga merupakan pelaku usaha pada bidang jasa dan produksi serta dagang. Dalam penelitian ini kami mengambil sampel pada Desa Betet Kecamatan Pesantren Kediri. Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara langsung dengan Kepala Desa Betet dan wawancara mendalam langsung dengan pelaku usaha, dimana pelaku usaha tersebut sebagai narasumber dalam memberikan informasi kepada peneliti, daerah tersebut berpotensi besar untuk meproduksi berbagai macam hasil olahan.

Hasil produksi khas yang menjadi ikon kota kediri yaitu kerpik tempe, sambel pecel, dan telur asin. pelaku usaha bekerja sama dengan pelaku usaha lain dalam hal pemesanan plastic kemasan terutama untuk pelaku usaha makanan seperti sambal pecel dan keripik tempe. Untuk pelaku usaha pembuat kurungan diusahakan membuat model lain yang lebih inovatif sehingga lebih diminati oleh pasar. Selain solusi tersebut, sebaiknya membuat kerjasama antar pelaku usaha seperti membuka lesehan dengan produk yang dijual adalah hasil produksi masyarakat (produksi yang heterogen) dan diadakan pameran sebagai wadah pemasaran bersama.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Bab I Pendahuluan 1
Bab II Kajian Pustaka..... 5
Bab III Tujuan Dan Manfaat Penelitian 14
Bab IV Metode Penelitian 19
Bab V Hasil dan Pembahasan 29
Bab VI Rencana Tahapan Berikutnya..... 39
Bab VII Penutup..... 40

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai data yang mendukung bahwa eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, khususnya data dari Kementrian Negara Koperasi & UKM tahun 2011. *Pertama,* jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi yang tercatat sebanyak 51,3 juta unit atau setara 99,91% dari total usaha. *Kedua*, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 97,04 % dari total angkatan kerja yang bekerja. *Ketiga*, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 55,56 % dari total PDB.

Dalam rangka mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM, Bank Indonesia memiliki kebijakan dari sisi permintaan (*Demand Side*) dan dari sisi penawaran (*Supply Side*). Kebijakan *Demand Side* adalah kebijakan yang diarahkan untuk mendorong UMKM agar mampu meningkatkan eligibilitas dan kapabilitasnya sehingga *bankable*. Kebijakan ini meliputi penelitian, pelatihan, penyediaan informasi dan kerjasama BI dengan lembaga internasional dan Pemerintah. Kebijakan *Supply Side* adalah kebijakan yang difokuskan pada berbagai kebijakan dan program untuk membantu bank dalam menyalurkan kredit kepada UMKM yang meliputi pengaturan kepada perbankan, penguatan kelembagaan dan penyediaan dana secara tidak langsung melalui penerbitan SUP No.005 dan dana *relending*.

Sebagaimana tersebut di atas, salah satu kebijakan dari sisi permintaan adalah penelitian. Penelitian dimaksud adalah dalam rangka pemberian informasi yang dapat digunakan untuk mendorong UMKM. Dari hasil penelitian diharapkan akan dapat diberikan informasi yang bermanfaat kepada *stakeholders,* baik kepada pemerintah daerah, perbankan, kalangan swasta, maupun masyarakat luas yang berkepentingan dalam upaya pemberdayaan UMKM.

Untuk itu, sebagai salah satu bentuk perwujudannya, Bank Indonesia sejak lama telah mengembangkan penelitian *Baseline Economic Survey* (BLS). Penelitian ini berupaya mengidentifikasi berbagai peluang investasi di daerah yang bermuara pada pemberian informasi potensi ekonomi suatu daerah. Dalam perkembangannya, sejak tahun 2006, penelitian BLS lebih diarahkan kepada penelitian pengembangan potensi ekonomi daerahyang memberikan informasi kepada *stakeholders* mengenai Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) yang potensial untuk menjadi unggulan daerah yang dapat dikembangkan. Penelitian ini akan tetap difokuskan terhadap UMKM yang merupakan pelaku ekonomi mayoritas di daerah.

Data dan informasi dalam Penelitian Pengembangan KPJU Unggulan UMKM meliputi berbagai aspek. Aspek makro berupa kebijakan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan potensi ekonomi daerah dalam rangka pengembangan UMKM. Sementara pada aspek mikro, meliputi kondisi dan potensi UMKM. Hasil penelitian tersebut akan didiseminasikan dalam *website* Sistem Informasi Terpadu Pengembangan UKM (SI-PUK) yang terintegrasi dalam Data dan Informasi Bisnis Indonesia (DIBI), dan dapat diakses melalui internet di alamat **www.bi.go.id**. Saat ini SI-PUK terdiri dari Sistem Informasi BLS (SIB) yang meliputi 31 provinsi, Sistem Informasi Agroindustri Berorientasi Ekspor (SIABE) yang meliputi 31 provinsi dan 16 komoditi agroindustri serta komoditi non agroindustri, Sistem Informasi Prosedur memperoleh Kredit (SI-PMK), Sistem Informasi Pola Pembiayaan/*Lending Model* Usaha Kecil (SI-LMUK) meliputi 112 komoditi, baik pembiayaan secara konvensional maupun syariah, serta Sistem Penunjang Keputusan Untuk Investasi (SPKUI) yang dapat digunakan untuk simulasi perhitungan interaktif kelayakan suatu usaha.

Pada kajian Penelitian Pengembangan Komoditas Unggulan UMKM ini, terdapat perubahan yang cukup mendasar dalam penetapan Daftar Skala Prioritas. Semula penetapan menggunakan kriteria data produksi, pendapat instansi dan data primer responden UMKM pada suatu KPJU di suatu kecamatan. Namun dengan metode tersebut hanya dapat diperoleh kelompok daftar KPJU Sangat Potensial (SP), Potensial (P) dan Kurang Potensial (KP) tanpa dapat diperoleh informasi urutan atau rangking KPJU dimasing-masing kelompok. Dengan demikian, sangat

sulit untuk menentukan KPJU apa yang paling unggul atau terunggul di kelompoknya masing-masing, karena KPJU dalam suatu kelompok dianggap sama, yaitu SP atau P atau SP. Disebut demikian karena penelitian ini juga menggunakan Metode Bayes dan Metode Borda dalam menetapkan KPJU unggulan kecamatan dan kabupaten/kota. Dengan penelitian tersebut, nantinya tiap kabupaten/kota di suatu provinsi diharapkan memiliki KPJU unggulan dari berbagai sektor ekonomi yang patut dan cocok untuk dikembangkan. Unggulan dapat dilihat dari beberapa perspektif:

a. Perspektif *Product Life Cycle* (PLC)

   KPJU disebut unggulan dengan melihat tahap kematangan dari KPJU. Apakah KPJU dalam tahap *mature* karena saat ini unggul dibanding KPJU yang lain (meskipun kemungkinan besar akan mengalami *decline* setelah melewati fase *mature*), atau saat ini tidak terlalu unggul namun berpotensi besar unggul di masa depan (*fase growth*). Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pada perspektif strategi pengembangan. Contoh untuk hotel, apakah pemilihan KPJU Unggulan tersebut tujuannya untuk *business development* (mengembangkan yang sudah ada/intensif) atau meperbanyak usaha yang bergerak dalam KPJU tersebut (ekstensif).

b. Perspektif Tujuan

   Dalam perspektif ini penentuan KPJU unggulan dengan mepertimbangkan tindak lanjut atau tujuan atau target yang ingin dicapai, misalnya meyakinkan investor untuk menanamkan uangnya di bisnis KPJU unggulan yang terpilih dengan jaminan *return* yang cepat, atau untuk memberikan stimulasi bagi usaha lemah namun berpotensi unggul di masa datang.

c. Perspektif Keberpihakan

   Pemilihan KPJU unggulan dengan melibatkan unsur keberpihakan, misalnya keberpihakan pada pengusaha lokal.

d. Perspektif Skenario Kebijakan

   Disebut unggulan, apakah karena dilihat dari kondisi saat ini (*existing*) KPJU unggul dibanding dengan yang lain tanpa melihat ada kontradiksi dengan skenario kebijakan pemerintah normatif.

Dengan melihat perspektif di atas, diharapkan program akan menjadi lebih fokus. Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan kebijakan ekonomi melalui pengembangan KPJU unggulan di suatu kabupaten/kota sebagai upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengurangi angka/tingkat kemiskinan di daerah.Pada akhirnya, hal tersebut diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

Sesuai dengan hasil Lokakarya Nasional Pengembangan UKM pada tanggal 24 Agustus 2005 di Jakarta yang dihadiri oleh Pimpinan Bank Indonesia, Kepala Kantor Perwakilan dan pejabat Satuan Kerja terkait di Kantor Pusat, telah disepakati bahwa mulai tahun 2006 pelaksanaan Penelitian Pengembangan KPJU Unggulan UMKM diserahkan kepada Kantor Bank Indonesia (KBI) di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Selanjutnya penelitian dalam rangka pembaharuan data dan informasi penelitian tersebut menjadi tugas dan wewenang KBI Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan *Destination Statement* peran KBI, yaitu sebagai *Advisor* Pemda dan penyedia data dan informasi di daerah.